

Kawasan Merapi Jadi Hutan Lindung

Kawasan terdampak erupsi Merapi seluas 1.300 hektar akan dijadikan hutan lindung. Untuk itu, 2.636 keluarga korban erupsi dan lahar dingin Merapi akan direlokasi ke tanah-tanah kas desa yang berada di luar kawasan rawan bencana. "Saran dari Kementerian Kehutanan, lahan seluas 1.300 hektar itu akan dijadikan hutan lindung, di mana masyarakat melalui koperasi masih bisa ikut mengelola. Lalu, tanah-tanah kas desa yang ada dijadikan tempat relokasi warga korban erupsi maupun lahar dingin," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Ma'arif di Yogyakarta, Sabtu (9/4).

Menurut Syamsul, tanah kas desa yang dijadikan tempat relokasi adalah hunian sementara (huntara) yang saat ini dihuni warga dan berada di luar kawasan rawan bencana, kecuali huntara Jetis Sumur yang sebenarnya masuk dalam kawasan rawan bencana.

Huntara bagi para korban erupsi Merapi dibangun di sembilan titik, yaitu Gondang I, Gondang II, Gondang III, Plosokerep, Kuwang, Dongkelsari, Banjarsari, Ketingan, dan Jetis Sumur.

Pembangunan huntara di Jetis Sumur sempat terkendala karena jaraknya hanya 8 kilometer dari puncak Merapi. Namun, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X kemudian memberikan izin, dengan persyaratan warga harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia direlokasi jika status Gunung Merapi meningkat dari waspada menjadi siaga.

Menurut Syamsul, kepastian relokasi bagi 2.636 keluarga korban erupsi dan lahar dingin akan diputuskan pada pekan depan setelah peta tata ruang kawasan Merapi terbentuk. Peta itu berbasis pada peta area rawan bencana yang telah dibuat Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial Sleman Kriswanto mengatakan, sampai bulan April, jumlah keluarga yang telah tinggal di huntara sebanyak 2.290 keluarga. Adapun 346 keluarga lainnya masih mengungsi di barak-barak pengungsian.

Segera dibangun

Menurut Syamsul, tahap rehabilitasi akan segera dimulai setelah peta tata ruang tersusun. "Kami menyarankan, Provinsi DIY dan Jateng segera menentukan kapan pembangunan fasilitas infrastruktur bisa dimulai. Jika menunggu ancaman lahar dingin berhenti, tentu saja terlalu lama sebab ancaman ini masih berlangsung tiga hingga empat tahun ke depan," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi DIY dan Jateng diharapkan segera menyusun rencana pembangunan fasilitas infrastruktur. Selanjutnya, BNPB akan mengajukan usulan tersebut ke DPR.

Untuk proses normalisasi sungai, misalnya, BNPB telah mengucurkan dana Rp 20 miliar. Bulan ini diajukan lagi dana normalisasi sungai Rp 444 miliar. (ABK)